

**STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK KPU DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN  
2020 DI KABUPATEN SOLOK**

***GENERAL ELECTION COMMISSION'S POLITICAL  
EDUCATION STRATEGY IN INCREASING THE  
PARTICIPATION OF BEGINNER VOTERS IN THE 2020  
REGENT AND DEPUTY REGENT ELECTIONS IN SOLOK  
REGENCY***

**Mega Sismita<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Pemikiran Politik Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
Email: megasismita29@gmail.com

**Abstrak**

Latar belakang penelitian ini dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum di Kabupaten Solok. Data dari KPU Kabupaten Solok menggambarkan tren yang mengkhawatirkan, dengan jumlah pemilih pemula yang menurun dari tahun ke tahun, serta adanya sikap apatis dalam proses politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek fenomena atau setting sosial dalam bentuk narasi dan kata-kata, dengan fokus pada strategi pendidikan politik KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020. Strategi pendidikan politik yang diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 terlihat melalui tiga indikator strategi. Dengan demikian, strategi pendidikan politik KPU Kabupaten Solok terfokus pada pendekatan tatap muka, sinergi dengan media massa, dan peningkatan kualitas relawan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020.

**Kata Kunci:** Strategi politik, Pendidikan politik, Partisipasi politik, Pemilih Pemula, PILKADA

***Abstract***

*The background of this research was triggered by the urgent need to increase the political participation of novice voters in general elections in Solok Regency. Data from the Solok Regency KPU illustrates a worrying trend, with the number of first-time voters declining from year to year, as well as the presence of apathy in the political process. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence the political participation of novice voters, formulate a political education strategy that can increase the political literacy and involvement of novice voters, and identify the obstacles that may be faced in the implementation of socialization. The research method applied in this study is qualitative research, which aims to describe the object of the phenomenon or social setting in the form of narratives and words, focusing on the KPU's political education strategy in*

*increasing the political participation of novice voters in the 2020 Solok Regent and Deputy Regent elections. The political education strategy implemented by the Solok Regency General Election Commission in the 2020 Regent and Deputy Regent elections is seen through three strategy indicators. Thus, the political education strategy of the Solok Regency KPU focuses on face-to-face approaches, synergy with mass media, and improving the quality of volunteers to increase the political participation of novice voters in the 2020 Regent and Deputy Regent elections.*

**Keywords:** *Political strategy, Political education, Political participation, Beginner Voters, PILKADA*

## **PENDAHULUAN**

Latar belakang penelitian ini dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum di Kabupaten Solok. Data dari KPU Kabupaten Solok menggambarkan tren yang mengkhawatirkan, dengan jumlah pemilih pemula yang menurun dari tahun ke tahun, serta adanya sikap apatis dalam proses politik. Fenomena ini diakibatkan oleh kurangnya literasi politik, orientasi politik yang dinamis, serta potensi pemilih pemula menjadi sasaran kampanye hitam yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendidikan politik yang efektif berupa sosialisasi sesuai dengan regulasi PKPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, merumuskan strategi pendidikan politik yang dapat meningkatkan literasi politik dan keterlibatan pemilih pemula, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasi sosialisasi.

Dalam konteks tersebut, perlunya pendekatan komprehensif dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula menjadi semakin nyata. Fenomena apatis dan kurangnya literasi politik pemilih pemula memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan strategi pendidikan politik yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Dengan pemahaman mendalam tentang konteks dan tantangan yang dihadapi, diharapkan penelitian ini

dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Solok, serta memberikan wawasan bagi pengembangan pendidikan politik yang lebih efektif dan inklusif.

Landasan teori yang mendukung pengembangan strategi politik dalam konteks pemilihan umum adalah sangat penting untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan memiliki dasar dan alasan yang kuat. Strategi politik, sebagaimana dinyatakan oleh Firmanzah (2008), mencakup tahapan penting seperti pengelanaan atau sosialisasi bakal calon, pendekatan untuk mendapatkan dukungan partai politik, komunikasi efektif kepada pemilih, dan penguatan hubungan dengan pendukung. Kacung Marijan (2010) menekankan bahwa strategi politik selalu melibatkan persaingan antara berbagai ideologi dan pandangan, yang akan menghasilkan perbedaan pendukung dan penentang. Dalam konteks pemilu, strategi tersebut harus dirancang dengan matang untuk memenangkan persaingan, mengatasi tantangan apatisme, dan membangun ikatan yang kuat dengan pendukung.

Chandler, yang dikutip oleh Salusu (2015), mengidentifikasi tiga indikator dalam penyusunan strategi, yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya. Ini menunjukkan pentingnya memiliki visi dan tujuan yang jelas, memahami lingkungan, serta memilih langkah yang tepat untuk mencapai tujuan. Strategi politik juga perlu melibatkan analisis internal dan eksternal organisasi, seperti yang diuraikan oleh Bambang Hariadi (2005), untuk mengukur kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang mungkin memengaruhi pelaksanaan strategi.

Pendidikan politik, sebagai bagian penting dari proses sosialisasi politik, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek politis dalam kehidupan mereka. Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan usaha sistematis dan terencana yang bertujuan membentuk individu yang sadar politik dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam sistem politik serta bertanggung jawab secara moral dalam mencapai tujuan politik. Pendidikan politik tidak hanya sebatas pengenalan peran individu dalam pemerintahan, partai politik, dan birokrasi, tetapi juga membentuk

nilai-nilai politik dan cara berpartisipasi dalam sistem politik (Mohammad Nuh dalam Wayan Sohib, 2009). Konsep ini sejalan dengan pandangan Giesecke, seorang sarjana Jerman, yang memandang pendidikan politik sebagai bentuk pembentukan pengetahuan (*bildungswissen*), orientasi (*orientierungswissen*), perilaku (*verhaltenswissen*), dan tindakan (*aktionwissen*) politik.

Tujuan utama pendidikan politik adalah menciptakan masyarakat yang melek politik, memiliki kesadaran politik, serta mampu berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan secara positif. Soeharto (2011) dan Ruslan (2000) sepakat bahwa pendidikan politik bertujuan membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik yang positif pada warga negara. Ini penting untuk menciptakan *good citizen* yang memahami hak dan kewajiban sebagai individu warga negara (Wahab, 1996). Pendidikan politik juga berfungsi memperluas wawasan, mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, serta menguatkan komitmen terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental seperti hak asasi manusia dan Pancasila (Khoiron, dkk., 1999). Tujuan tersebut diarahkan untuk membentuk individu yang mampu melihat dan mengatasi konflik dalam masyarakat, serta mengambil keputusan politik dalam konteks yang sehat dan demokratis.

Partisipasi politik adalah aspek penting dari demokrasi yang mendasarkan pada keyakinan bahwa individu memiliki pengetahuan terbaik tentang apa yang baik bagi diri mereka sendiri. Keputusan politik pemerintah memiliki dampak besar pada kehidupan warga negara, sehingga warga memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Budiarjo (2008) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan aktif individu atau kelompok dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, mempengaruhi pemerintah, atau menjadi bagian dari partai politik atau gerakan sosial. Jenis partisipasi masyarakat dapat dibedakan berdasarkan tingkat aktivitasnya, seperti partisipasi aktif, militan-radikal, pasif, dan apatis (Rahman Surbakti, 2007). Suryadi (2007) menggambarkan tiga tingkatan partisipasi politik: aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Faktor-faktor seperti situasi sosial dan ekonomi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, serta pengaruh

media massa dan diskusi formal juga mempengaruhi tingkat partisipasi politik individu (Subakti, 2012).

Berbagai teori dan pandangan mengenai partisipasi politik memberikan wawasan yang lebih mendalam. Teori Rothn dan Wilson (dalam Suryadi, 2007) membagi partisipasi berdasarkan frekuensi dan intensitasnya, dengan perbedaan antara kegiatan yang melibatkan banyak orang tetapi tidak intensif, seperti pemilihan umum, dan partisipasi yang intensif dan sepenuh waktu yang dilakukan oleh jumlah yang lebih sedikit. Selain itu, Lane (seperti yang dikutip dalam teks) mengidentifikasi empat fungsi partisipasi politik: sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, penyesuaian sosial, pencapaian nilai-nilai khusus, dan pemenuhan kebutuhan psikologis. Penghambat dan pendukung partisipasi politik juga memiliki peran penting. Milbrath (seperti yang disebutkan dalam teks) menyebut faktor pendukung seperti kesadaran politik dan faktor karakteristik pribadi, sementara faktor penghambat mencakup perubahan kebijakan organisasi dan kurangnya dukungan. Semua teori ini memberikan pandangan yang holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik individu

Pemilih pemula memegang peran penting dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilu atau pilkada. Menurut Prihatmoko (2005), pemilih adalah individu atau kelompok yang menjadi target para kontestan politik untuk dipengaruhi agar mendukung mereka. Pemilih pemula, di Indonesia didefinisikan sebagai warga negara yang pertama kali memilih dalam usia 17-21 tahun (Fenyapwain, 2013). Mereka dapat dibagi menjadi tiga kategori: pemilih rasional yang memilih berdasarkan analisis mendalam, pemilih kritis emosional yang masih idealis, dan pemilih pemula yang baru memasuki usia memilih. Syarat yang harus dipenuhi pemilih, seperti usia dan status kawin, diatur oleh undang-undang (UU No. 10 Tahun 2008). Pemilih pemula memerlukan pembinaan dan pengembangan potensi serta kemampuan untuk memahami dan berperan dalam politik. Kebebasan dalam sistem demokrasi Pancasila memungkinkan pemilih pemula mengembangkan pemikiran politiknya, namun penting untuk memberikan pendidikan politik yang baik agar mereka tidak apatis terhadap politik.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan tugas-tugas kepemimpinan secara demokratis. Sistem pemilihan langsung digunakan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam menentukan kepemimpinan yang diinginkan, sebagai tanggapan atas tuntutan perubahan sistem politik dan format demokrasi dalam era reformasi (Pratikno, 2005). Pemilihan kepala daerah secara langsung menghasilkan legitimasi kuat dan stabilitas pemerintahan, serta meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintah, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik (Maswadi Rauf, 2005). Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah otonomi.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung memiliki implikasi yang positif bagi demokrasi dan pemerintahan daerah. Proses pemilihan langsung memungkinkan kepala daerah memiliki legitimasi yang kuat dan bertanggung jawab kepada rakyat, karena dipilih langsung oleh masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004). Selain itu, pilkada langsung juga mendukung keberlanjutan kepemimpinan daerah, karena masa jabatan kepala daerah tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD. Keterpilihan kepala daerah ditentukan oleh suara rakyat, sehingga kepala daerah memiliki modal politik yang kuat untuk membangun dan mengelola daerahnya (Fitriyah, 2013). Partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada langsung juga mencerminkan pemberdayaan politik yang lebih besar, di mana masyarakat tidak hanya menentukan pemimpin, tetapi juga terlibat dalam mengawasi kinerja dan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi landasan yang kuat dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif di tingkat daerah

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek fenomena atau setting sosial dalam bentuk narasi dan kata-kata, dengan fokus pada strategi pendidikan politik KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020. Penelitian kualitatif ini melibatkan pengamatan langsung pada individu dan komunitas yang terlibat, dengan tujuan menggali makna dan pandangan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Seperti yang diungkapkan oleh Kirk dan Miller, penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan partisipan (Moleong, 2002:71). Metode ini menerapkan pendekatan etnografi yang berfokus pada identifikasi pola perilaku dan budaya yang berkembang dalam komunitas tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas para partisipan, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang strategi pendidikan politik dan upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula (Creswell, 2017:24).

Dalam penelitian ini, peneliti telah membangun kriteria subjek penelitian yang berfungsi sebagai patokan dalam memilih subjek yang tepat untuk mendapatkan data yang diperlukan. Subjek penelitian adalah anggota KPU sejumlah 4 orang yang berasal dari Kabupaten Solok. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus pada strategi pendidikan politik KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020. Peneliti menjadi key instrument utama dalam pengumpulan data, dengan menerapkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan staf KPU dan pemilih pemula, sedangkan data sekunder berasal dari sumber tertulis dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui pengurangan data, penyajian data, dan kesimpulan, dengan prinsip triangulasi sumber, metode, dan teori untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Temuan Umum Penelitian**

Wilayah Solok termasuk dalam Luhak Tanah Datar dan dikenal sebagai Luhak Kubuang Tigo Baleh. Wilayah ini juga menjadi tempat perpindahan nenek moyang Alam Surambi Sungai Pagu dari Tanah Datar, yang dikenal sebagai nenek kurang aso enam puluh, merujuk pada enam puluh orang leluhur alam surambi Sungai Pagu. Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1913, Solok telah menjadi nama suatu unit administrasi setingkat kabupaten dengan nama Afdeeling Solok. Sejak itu, Solok digunakan sebagai nama wilayah administratif pemerintahan setingkat kabupaten/kota. Pada tahun 1970, ibukota Kabupaten Solok berkembang menjadi Kota Solok. Pemindahan pusat pelayanan pemerintahan terjadi pada tahun 1979 ke Koto Baru, Kecamatan Kubung, namun tetap mempertahankan status ibu kota kabupaten. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur wilayahnya. Pada tahun 2001, dilakukan penataan ulang wilayah administrasi dengan perubahan signifikan dalam jumlah kecamatan, nagari, dan jorong. Pada akhir tahun 2003, terjadi pemekaran Kabupaten Solok menjadi dua kabupaten: Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan, mengakibatkan pengurangan jumlah wilayah administrasi.

### **Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang KPU Kabupaten Solok Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula**

Dalam upaya perencanaan strategi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok telah melaksanakan langkah-langkah penting dalam tahap formulasi. Hal ini termasuk sosialisasi melalui program "KPU Goes To School" yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Menurut Bapak Dr. Yusrial, S.HI, MA, wakil Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, KPU Kabupaten Solok berusaha menjalankan program tersebut dengan mengunjungi sekolah-sekolah dan lembaga terkait, meskipun terkendala oleh pandemi COVID-19. Ibu Vivin Zulia Gusmita, S.Pd, Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, juga menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih pemula dalam pemilu. Sasarannya adalah pemilih pemula berusia 17-21 tahun di

Kabupaten Solok, dan metodenya melibatkan pertemuan tatap muka serta pemanfaatan media massa dan media sosial. Menurut Ibuk Tri Sesfiwerni, A.Md, KPU Kabupaten Solok berkolaborasi dengan media massa cetak, online, dan radio untuk memperluas jangkauan informasi tentang pemilu. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan media cetak memudahkan penyampaian informasi kepada pemilih pemula, termasuk informasi tentang pencalonan, pendaftaran pasangan calon, kampanye, jenis dan kriteria surat suara, serta proses pemilihan. Meskipun terkendala oleh pandemi, KPU Kabupaten Solok telah berhasil melakukan sosialisasi di beberapa sekolah seperti MAN 1 Solok, SMAN 1 IX Koto Sungai Lasi, SMAN 1 Kubung, SMAN 1 Gunung Talang, SMAN 2 Gunung Talang, dan SMAN 1 Bukit Sundi.



Launching Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2020 dilaksanakan tanggal 2 Februari 2020 bertempat di lapangan kampus Maha Putra Muhammad Yamin (UMMY). Kegiatan yang melibatkan jasa event organizer ini menghadirkan KPU Provinsi Sumatera Barat, forkopimda, stakeholder terkait, organisasi kemasyarakatan dan diramaikan oleh masyarakat luas, tidak hanya itu kegiatan ini juga ikut dimeriahkan oleh Arif Lida, Mak Ipin & One Tina yang ikut menyumbangkan suara emasnya untuk memeriahkan acara ini. Kegiatan ini sekaligus memberitahukan kepada pemilih khususnya masyarakat Kabupaten Solok bahwa tahapan pemilihan serentak tahun 2020 telah dimulai. KPU dan Kabupaten Solok siap untuk menjalankan seluruh tahapan pemilukada sesuai dengan tugas dan wewenang KPU.



Pada tanggal 7 Juli 2020, KPU Kabupaten Solok mengadakan kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak di Gedung Pertemuan Solok Nan Indah, kompleks perkantoran Bupati Solok Arosuka. Acara ini dihadiri oleh Bupati Solok, Forkopimda Kabupaten Solok, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Solok, dan Wali Nagari se-Kabupaten Solok. Kegiatan ini juga melibatkan seluruh Walinagari di Kabupaten Solok dan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Solok bersama Polres Arosuka. Tujuan utama dari acara tersebut adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih calon Bupati dan Wakil Bupati yang baik, serta untuk meningkatkan kesadaran akan partisipasi politik dalam membangun Kabupaten Solok.



Selama kegiatan sosialisasi, KPU Kabupaten Solok juga menjalankan program "Nagari Sadar Memilih," yang mengajak seluruh Walinagari di

Kabupaten Solok untuk turut berkontribusi dalam mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan selama pemilihan. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk mencegah terjadinya klaster baru COVID-19 selama proses kampanye dan pemungutan suara. KPU Kabupaten Solok bekerjasama dengan media massa cetak, online, dan radio dalam menyebarkan informasi, termasuk mengenai informasi pencalonan perseorangan, pendaftaran pasangan calon, dan kampanye. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Selain itu, laman website KPU Kabupaten Solok juga menyediakan informasi terkait data pemilih, data pencalonan, dana kampanye, serta ajakan untuk menjadi PPK, PPS, KPPS, dan PPDP. Landasan hukum dari tahapan sosialisasi ini mencakup berbagai peraturan dan undang-undang terkait pemilihan umum, yang memberikan dasar dan arahan bagi pelaksanaan sosialisasi yang efektif dan sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19.



Dalam upaya menyosialisasikan pemilihan serentak tahun 2020, KPU Kabupaten Solok mengambil berbagai metode, salah satunya adalah sosialisasi kepada segmen pemilih pemula. Melalui sosialisasi ini, KPU bertujuan untuk membangun pemahaman dan kesadaran pemilih pemula tentang peran penting pemuda dalam kegiatan demokrasi, serta mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan demi pembangunan Kabupaten Solok yang lebih baik. Metode yang digunakan melibatkan tatap muka dengan pola penyampaian seperti ceramah, diskusi, simulasi, dan permainan game. Bapak Edvant Zuvadeno A,

S.Kom, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas, menjelaskan, "*Materi yang kami sampaikan yaitu lebih kepada membangun pemahaman dan kesadaran kepada pemilih pemula tentang peran pemuda dalam kegiatan demokrasi dan juga bagaimana partisipasi mereka untuk memilih pemimpin yang akan datang.*"

Selain itu, KPU Kabupaten Solok juga bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat (ormas) seperti Muhammadiyah, NU, dan PERTI dalam upaya menyebarkan informasi mengenai pemilu. Bapak Edvant Zuvadeno A, S.Kom, menuturkan, "*KPU Kabupaten Solok juga dibantu oleh beberapa ormas yang ada di Kabupaten Solok yaitu Muhamadiyyah Kabupaten Solok, NU Kabupaten Solok, dan PERTI Kabupaten Solok untuk menyebarkan informasi mengenai pemilu.*" Ormas-ormas ini membantu dalam menyebarkan informasi kepada anggota-anggotanya dan masyarakat secara lebih luas, sehingga cakupan sosialisasi yang dilakukan KPU dapat lebih efektif. Kerjasama dengan ormas ini memiliki tujuan untuk memperluas jangkauan informasi mengenai pemilihan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Sumber daya memiliki peran krusial dalam melaksanakan kegiatan organisasi, termasuk dalam kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok. Untuk memastikan suksesnya pelaksanaan pemilihan, KPU Kabupaten Solok melakukan upaya peningkatan sumber daya melalui kegiatan bimbingan teknis kepada panitia penyelenggara pemilihan. Ini mencakup pemahaman terhadap tugas dan tahapan serta pentingnya berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan pemilihan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme para penyelenggara, tetapi juga sesuai dengan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2015 mengenai Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan. Bimbingan teknis ini memberikan landasan yang kuat bagi para penyelenggara untuk beroperasi sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.

Sementara sumber dana untuk kegiatan sosialisasi pemilihan berasal dari dana hibah pemerintah Kabupaten Solok. Bapak Yusrial, dalam wawancara, mengungkapkan bahwa meskipun dana hibah tersebut dianggap cukup baik, kendala muncul akibat pandemi COVID-19. Anggaran yang semula

diperuntukkan untuk sosialisasi harus dialihkan untuk kegiatan lainnya, sehingga kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini mencerminkan pengaruh pandemi terhadap alokasi sumber daya dan aktivitas organisasi, namun KPU tetap berusaha mengoptimalkan dana yang tersedia untuk tujuan yang sebesar-besarnya.

Secara keseluruhan, sumber daya dan dana menjadi komponen krusial dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilihan. Upaya peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan penggunaan dana hibah menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Solok dalam memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **SIMPULAN**

Strategi pendidikan politik yang diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 terlihat melalui tiga indikator strategi. Pertama, KPU telah merumuskan langkah-langkah jangka panjang dengan tujuan yang jelas, termasuk program "KPU Goes To School" yang mensosialisasikan pemilukada kepada pemilih pemula, meluncurkan tahapan pemilihan, serta melibatkan masyarakat dalam gerakan sadar memilih dan sadar memakai masker. Kedua, dalam pemilihan tindakan sosialisasi, KPU memilih metode tatap muka seperti ceramah, diskusi, dan dialog untuk program "Goes To School", serta menyampaikan seluruh tahapan pemilihan dalam kegiatan "Nagari Sadar Memilih". Ketiga, meskipun terdapat hambatan dalam alokasi sumber daya, KPU Kabupaten Solok berusaha meningkatkan kualitas relawan demokrasi melalui bimbingan teknis dan breafing, meskipun tidak secara rutin. Dengan demikian, strategi pendidikan politik KPU Kabupaten Solok terfokus pada pendekatan tatap muka, sinergi dengan media massa, dan peningkatan kualitas relawan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2017). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar.
- Fenyapwain, M. (2013). Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jurnal Politik, 17(2), 94-112.
- Firmanzah. (2008). Strategi Politik Kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Penerbit Buku Kompas.
- Fitriyah, N. (2013). Pilkada Langsung dan Kedaulatan Rakyat. Retrieved from Giesecke (dalam Kartono, 1989). "Politische Bildung Ist Bildungswissen, Orientierungswissen, Verhaltungsweisen Und Aktionswissen."
- Kacung Marijan. (2010). Strategi dan Taktik Memenangkan Pemilu. Penerbit Kompas.
- Kartono, Kartini A. (1989). Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khoiron, M. Nur. (1999). Pendidikan Politik Bagi Warga Negara. Surakarta: UNS Press.
- Maswadi Rauf. (2005). Konsep Politik dan Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad Nuh (dalam Wayan Sohib, 2009). Kutipan tidak memiliki referensi lengkap.
- Moleong, L. J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Pratikno, Y. (2005). Demokratisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Tantangan dan Dinamika. Penerbit Buku Kompas.
- Prihatmoko, T. (2005). Pengantar Ilmu Politik. Pustaka Pelajar.
- Ruslan, Rusli. (2000). Dasar-dasar Pendidikan Politik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salusu, J. (2015). Analisis strategi pengembangan usaha pada CV. Swadaya. Jurnal Akuntansi, 3(1), 64-72.
- Soeharto. (2011). Pendidikan Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul. (1996). Pendidikan Politik di Sekolah. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.